

Sriwijaya Universitas – Sumatera Selatan

Agenda Persiapan Desentralisasi di Propinsi Sumatra Selatan
(An Agenda for Decentralization Preparedness in South Sumatra Province)

Decentralization Workshop II
Strengthening the University Capacity to Support Decentralization
(Lokakarya Kedua Untuk Meningkatkan Kesanggupan Universitas
Mendukung Desentralisasi)

Project 497-0357 / 104-000
Strategic Objective 1
ECG, USAID/Indonesia
Contract No. 497-C-00-98-00045-00

Center for Institutional Reform and the Informal Sector (IRIS)
University of Maryland at College Park

June 4 – 10, 2000

USAID-funded Partnership for Economic Growth (PEG Project).
The views expressed in this report are those of the author and not necessarily those of
USAID, the U.S. Government, or the Government of Indonesia.

**AGENDA PERSIAPAN DESENTRALISASI
DI PROPINSI SUMATRA SELATAN**

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

Disampaikan Pada:

**Second Workshop on Strengthening the University
Capacity to Support Decentralization
June 5 - 10, 2000**

JAKARTA

hal yang belum dilakukan Salah satu Biro yang menangani masalah ini otonomi sudah dibenutuk di Pemda, namun Biro Otonomi belum berfungsi sebagaimana seharusnya. Biro memang memiliki Bagian Keuangan, Kepegawaian. Organisasi dan lainnya. Namun Bagian-bagian tersebut belum memiliki peran dan fungsi sebagaimana namanya, karena Bagian-Bagian yang dimiliki Biro Otonomi ini kurang mempunyai data yang seharusnya dimiliki.

Hingga kajian terakhir DPRD Propinsi Sumatra Selatan belum membahas apalagi mengesahkan beberapa Peraturan Daerah yang diajukan Pemerintah Daerah. Begitu pula DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, 60 km dari Palembang, sudah beberapa Perda namun belum dibahas oleh DPRD OKI.

Hal penting lainnya yang belum banyak berubah di kalangan Pemerintah Daerah Propinsi Sumatra Selatan adalah lambannya pelayanan Aparat Pemda, utamanya peringkat menengah ke bawah terhadap masyarakat. Membutuhkan waktu hampir tiga minggu untuk menjawab surat permintaan data dan informasi. Ini merupakan refleksi bahwa aparat peringkat tersebut kurang mempunyai kreatifitas dalam mengambil suatu keputusan.

Masalah keperluan berapa banyak Biro dan Dinas yang diperlukan datanya kurang tersedia. Pemda tampaknya masih tetap mengacu ke Peraturan Pemerintah tentang keperluan kelembagan dan organisasi. Disini diperlukan adanya laboratorium tentang desentralisasi, yang bertugas untuk mengkaji berbagai hal yang berhubungan dengan otonomi seperti menyangkut: keperluan pegawai, kajian potensi-potensi PAD dan lainnya.

Sektor andalan Kabupaten OKI adalah sektor pertanian Tahun 1993 sektor menyumbang sebesar Rp 80.369 juta dan meningkat menjadi Rp 99.541 juta tahun 1997 atau meningkat sebesar 24%. Persiapan Pemda untuk otonomi antara lain pertama, peninjauan kembali struktur lembaga/dinas-dinas yang telah diserahkan ke daerah Tingkat II sebanyak 14 Dinas. Kedua, Peningkatan status Cabang-Cabang Dinas Tingkat I menjadi Dinas Tingkat II. Dinas-dinas yang masih dalam proses pembentukan adalah Dinas Pertambangan, Kehutanan, Bappedalda, Kependudukan, Pendataan Penduduk, BIIPP Kearsipan, Dinas P & K Kecamatan, dan Perpustakaan Daerah. Pembentukan Dinas-Dinas baru yang sesuai dengan Tingkat II antara lain Dinas Eksploitasi Kelautan, Dinas Kebersihan, dan Dinas lain yang mungkin dianggap perlu.

Sumber PAD OKI selama lebih dari 10 tahun terakhir tidak banyak berubah yaitu lelang lebak lebung yang menghasilkan Rp.3,1 milyar, Galian C yang mengumpulkan Rp 294 juta Terminal memperoleh dana PAD

sebesar Rp 385 juta dan IHH. Secara kuantitatif jumlah PAD meningkat namun secara keaneragaman sumber masih tidak berubah. Kehadiran UU No 18. 1997 telah menghapus beberapa jenis sumber PAD Kabupaten OKI. Pajak meterai yang telah dihapus sebelumnya mampu mendapatkan Rp 250 juta. Tahun 1996 PAD Kabupaten OKI telah mencapai Rp. 2,73 milyar, dan tahun 2000 meningkat hanya sebesar Rp. 3,53 milyar.

Kabupaten Muara Enim telah menjadi percontohan daerah otonomi sejak tahun 1997. Kemajuan selama tiga tahun hanya menyiapkan bidang-bidang yang akan diserahkan ke daerah atau materi fungsi SDM, Anggaran, pra dan sarana. Di Propinsi Sumatra Selatan otonomi baru dapat berperan paling tidak lima tahun lagi. PAD Muara Enim tahun 1996/1997 sebesar Rp. 5 milyar dan tahun 1999/2000 meningkat menjadi Rp.6,1 milyar.

Jumlah kewenangan yang diajukan propinsi Sumatra Selatan sebagai daerah otonom ada sebanyak 288 kewenangan, dan PP 25 tahun 2000, terdapat sebanyak 193 wewenang. Perbedaan yang cukup mencolok antara lain adalah wewenang pertanian daerah mengusulkan sebanyak 27, namun PP 25 tahun 2000 hanya 8 wewenang. Bidang kehutanan dan perkebunan juga terlihat perbedaan. Versi pemerintah Daerah sebanyak 31 wewenang, namun PP 25, 2000 hanya sebanyak 16 wewenang. Perbedaan jumlah wewenang ini belum dapat dibahas karena daerah masih mempelajari PP No 25 tahun 2000.

Sektor Kehutanan dan Perkebunan mengajukan 31 kewenangan, selanjutnya sektor pertanian merencanakan 27 kewenangan. Pendidikan dan Kebudayaan mengusulkan 22 wewenang. Pendidikan dan Pemberdayaan perempuan cukup banyak, yaitu 16 wewenang hampir sama dengan yang diajukan PU sebanyak 15 buah. Jumlah kewenangan yang diusulkan Sektor Pertambangan & Energi sama banyak jumlah kewenangan Sektor Penerbangan dan Keternagakerjaan. Namun ada juga sektor mengajukan sedikit wewenang seperti yang diajukan sektor : Perindustrian dan Perdagangan (7w), sektor Penataan Ruang. Lingkungan Hidup dan Penanaman Modal masing-masing hanya mengajukan 3, 4 dan 5 wewenang.

5. Penutup

Terjadi beberapa perbedaan pandangan tentang otonomi oleh berbagai birokrasi daerah Sumatra Selatan. Sebahagian, utamanya elit Pemda propinsi menginginkan otonomi berada di propinsi, di pihak lain elit pemda kabupaten, seperti Kabupaten OKI menginginkan otonomi berada di kabupaten. Namun demikian ada pula yang menginginkan otonomi berada di tingkat propinsi untuk beberapa tahun (3-4 tahun),

kemudian diserahkan sepenuhnya kepada kabupaten/kota. Masa 3-4 tahun diharapkan masa belajar bagi pemerintahan kabupaten/kota.

Transfer fungsi masih memerlukan kajian yang serius dan teliti dengan visi dan misi yang jelas. Transfer PNS diharapkan bukan menjadi masalah besar, setelah penyerahan Kanwildep ke daerah, jika sebelum penyerahan Dinas belum ada. Namun akan menjadi masalah dan mungkin timbul kecemburuan jika transfer pegawai ini dialami oleh Kanwildep yang telah memiliki Dinas di propinsi. Akan tetapi sampai akhir-akhir ini, rencana transfer – berapa banyak? Kemana?, bagaimana dana yang disiapkan?, belum ada rencana ke arah itu yang dilakukan ANJAB dan BPJK.

Masalah pembiayaan yang terkait dengan kapasitas pajak dan pendapatan masih memerlukan ngosiasi lebih lasnjut antara pusat dan daerah. Sebagai Perguruan Tinggi seyogyanya mengadakan kajian-kajian desentralisasi yang sangat membantu. Proses kelangsungan desentralisasi dengan mengintensifkan sosialisasi desentralisasi, seyogyanya daerah-daerah mempunyai Forum Regional untuk maju bersama. Jangan ingin jadi "*pahlawan sendiri*". Dalam barisan anda ada bagian-bagoan yang lemah, tidak mampu yang juga harus anda bandingkan.

Adalah sangat diperlukan penyusunan *social accord* daerah dengan regional. Untuk menuju *social accord* nasional (bottom-up acoord).

AGENDA PERSIAPAN DESENTRALISASI DI PROPINSI SUMATRA SELATAN

Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

1. PENDAHULUAN

Dengan lahirnya UU No 22 dan UU No 25 merupakan pertanda terjadinya perubahan besar dalam struktur pemerintahan dan keuangan Negara. Jika dilihat dalam setengah abad rentangan waktu hal ini dapat juga suatu *revolusi*. Pada gagasan awal cita-cita Desentralisasi yang dimaksud adalah dalam upaya memperkuat integrasi bangsa dengan asumsi bila komponen-komponen yang berperilaku didalamnya telah sampai kepada kesadaran dan kematangan berbangsa dan bernegara yang lebih maju. Namun demikian sikap berhati-hati dalam implementasi kedua UU tersebut perlu dicermati, karena dalam proses desentralisasi tersebut terkandung unsur-unsur desintergasi. Unsur-unsur itu antara lain :

PERTAMA dalam proses transfer fungsi yang pada kenyataannya adalah berbagi-bagi kekuasaan antara pusat dan daerah yang membutuhkan kesabaran dan keuletan dalam bernegosiasi, adalah perlu disadari bahwa pada tahun 2001 mungkin persiapannyapun belum selesai. Kita bisa berkaca kepada transformasi yang terjadi di Rusia yang sudah berlangsung 10 tahun lebih. Negosiasi-negosiasi tersebut tampaknya belum selesai tahun ini karena pada pertengahan tahun ini negosiasi antara pemerintah tingkat propinsi dengan pusat belum mantap walaupun telah dikeluarkan PP No 25 pada bulan Mei yang lalu. Padahal negosiasi-negosiasi berikutnya masih relatif rumit, antara pemerintah Propinsi dengan Daerah Tingkat II (Kabupaten dan Kotamadya). Berbagai masalah dalam negosiasi ini tidak hanya dalam kekuasaan dan keuangan tapi juga masalah keutuhan daerah misalnya, masalah-masalah eksternalitas dan aturan main antar daerah masih belum dipersiapkan. Malah pada umumnya mereka berangan-angan : Setelah kita jadi daerah otonomi kita akan lebih baik.

KEDUA : Adakah hukum besi yang bisa memaksa setiap transfer fungsi diikuti oleh transfer dana secukupnya. Melihat pengalaman masa lalu alokasi dana dari pusat ke daerah atau dari propinsi ke daerah tingkat II selalu diikuti oleh ketidakpuasan yang menuntut keadilan lebih besar pada masa lalu alokasi berdasarkan luas daerah, jumlah penduduk, panjangnya jalan raya dan tersediannya sumber daya alam telah dipertimbangkan tetapi hasilnya tetap menimbulkan kesenjangan disinipun kita dengan kerendahan hati mencoba untuk mengingatkan keuletan dan kesabaran untuk mendapatkan

formula-formula yang lebih adil merupakan modal utama untuk menyesuaikan konflik-konflik yang akan terjadi.

Dengan demikian, dalam kesempatan ini kami tidak berniat untuk menyelesaikan semua masalah-masalah desentralisasi di daerah kami ataupun dengan pusat., mungkin kita sepaham ini adalah bagian awal daripada proses tersebut yang ujungnya belum dapat dilihat dengan pasti. Namun demikian kami mencoba memperkirakan kecenderungan-kecenderungan dengan andaian-andaian tertentu.

Berdasarkan pengalaman sebulan yang lalu setiap pihak yang ditanya senantiasa khawatir bahwa mereka tidak siap padahal memang tidak siap ini mempunyai makna dan tafsiran yang luas. Malahan di beberapa daerah kadang-kadang terlihat sikap frustrasi menghadapi pejabat-pejabat pusat sehingga timbul tuduhan: *Tuduhan disentralisasi setengah hati*, hal ini perlu dihindarkan, tidak ada yang setengah hati yang ada hanyalah kerja dan pemanfaatan waktu yang lebih efisien yang berbeda-beda. Ketika bertemu rasanya enak sekali dan menyegarkan tetapi setelah berpisah kacau dan bingung.

II. TINJAUAN MAKRO dan REGIONAL

Setelah Indonesia memasuki era reformasi, tampak relatif sulit untuk mencapai *social accord* oleh karena masa lalu telah di kooptasi melalui musyawarah untuk mufakat tetapi pada kenyataannya adalah mufakat untuk musyawarah dalam S.A. Dalam era reformasi kehadiran setiap komponen/kelompok (apakah etnis, agama dan ras) semakin diakui untuk berpartisipasi, sedangkan budaya partisipasi didominasi oleh budaya mobilisasi.

Gambaran 30 tahun yang lalu dipandang sebagai produk-produk otoriter yang penuh dengan ketidakadilan yang mungkin mengandung banyak paradok. Begitu juga untuk melihat proses desentralisasi dewasa ini dapat dilihat sumber-sumber paradok dimasa depan seperti, Ya..... lima fungsi tetap pada pemerintah pusat seolah-oleh pemerintah pusat tidak ikut mencampuri fungsi-fungsi lainnya, padahal hasil negosiasi di daerah-daerah dapat mengundang intervensi pemerintah pusat. Hal ini terlihat dengan jelas dalam PROPENAS-2000 (mungkin masih dalam perbaikan).

Berikutnya ada anggapan bahwa "berwenang terlebih dahulu saya peroleh soal dana dapat saya cari". Hal ini tentu dengan asumsi bahwa SDM daerah cukup berkualitas untuk mengembangkan dan menggali sumber-sumber pendapatan daerah. Justru yang sering terjadi adalah diskresionare kekuasaan, jika tidak terkontrol dengan baik atau tidak terkontrol dengan efektif. Aspek lain yang juga menarik untuk diperhatikan adalah bahwa

dalam proses desentralisasi banyak keinginan-keinginan yang berdasarkan ukuran-ukuran internasional/global yang mungkin *dipaksakan* untuk dipakai tetapi kurang cocok dengan kondisi lokal/nasional demikian kita perlu kajian-kajian lebih cermat.

Di samping itu jika kita menggunakan ukuran-ukuran alamiah sering melanggar prinsip-prinsip keadilan sehingga perlu dijustifikasi melalui kebijakan-kebijakan sedangkan kebijakan-kebijakan ini sebagian dari S.A. Sekali lagi kami mengundang sikap sabar yang mendalam, contohnya adalah rasional jika alokasi dana pusat ke daerah berdasarkan PDRB masing-masing daerah. Pada kenyataannya walaupun ukuran itu rasional ternyata hal itu merupakan salah satu sumber kesenjangan begitu juga kalau indikator sumber daya alam, dan luas wilayah digunakan tampak dengan jelas menimbulkan kesenjangan, contohnya DKI Jakarta, NTB dan Bali hampir tidak mempunyai sumbangan SDA pada PDRB dan sebaliknya terjadi pada propinsi Kaltim, Riau dan Aceh.

Angka-angka masa lalu perlu diamati walaupun menyedihkan untuk motivasi masa depan. Memang tidak menggembirakan. Misalnya PAD Papua dan Maluku hanya sekitar 7 % dari APBD, dan bila ingin menjadi otonomi yang seluas-luasnya, kegamangan akan dialami banyak daerah, karena daerah harus meningkatkan 5-10 kali dari PAD dewasa ini. Oleh karena itu proses itu "*still along way to go*", yang meminta kesabaran keuletan dan bervisi jauh untuk desentralisasi dalam Indonesia Baru.

Namun demikian paradigma pembangunan telah berkembang dengan pesat misalnya telah beralih dari *Growth Center* ke *Peopler Center* yang merata dan berkesinambungan. Secara internasional paradigma ini sudah diterima diberbagai negara-negara yang sedang berkembang. Oleh karena itu, kita mencoba untuk mempertimbangkan indikator-indikator sosial yang lebih mendekati aspek manusiawi dan sasaran-sasaran dalam pemberdayaan suatu daerah.

Kajian ringkas ingin mengulas secara sekilas tentang persiapan dan prospek pelaksanaan otonomi Sumatra Selatan dalam jangka pendek. Bagaimana transfer PNS secara Vertikal dan horizontal?, Bagaimana rencana dan prospek pelimpahan wewenang dan keuangan untuk menjalankan pemerintahan yang otonom?. Apa yang perlu dan mendesak dilakukan untuk menciptakan dan meningkatkan akuntabilitas pada tingkat daerah dan DPRD?

Disamping itu akan juga di bahas tentang perbandingan PAD dengan APBD per kabupaten, menurut proporsi penduduk masing – masing kabupaten. Akan membandingkan pula subsidi dan sumbangan dengan rasio

penduduk miskin, termasuk pula membandingkan Belanja Dinas dengan jumlah pegawai untuk tiap Dinas.

III. KEADAAN SOSIAL & EKONOMI DAERAH

Kondisi sosial dan ekonomi daerah sangat menentukan agenda desentralisasi di masing-masing daerah. Dapatlah dibuat hipotesis bahwa daerah yang kaya akan "natural resources" (NR) belum tentu dapat atau mampu meningkatkan PAD-nya, sebaliknya daerah-daerah yang tidak kaya akan NR, belum tentu tidak mampu meningkatkan PAD mereka.

Tabel 1. Jumlah Kabupaten, Kotamadya, Desa, Kelurahan Propinsi Sumatera Selatan tahun 1996/1998

No	Kabupaten/Kotamadya	1996			1998		
		Desa	Kelurahan	Jumlah	Desa	Kelurahan	Jumlah
1	Ogan Komering Ulu	540	7	547	486	7	493
2	Ogan Komering Ilir	481	7	488	427	7	434
3	Muara Enim	302	14	316	268	14	282
4	Lahat	588	19	607	592	19	611
5	Musi Rawas	246	27	273	253	27	280
6	Musi Banyuasin	154	6	160	412	6	418
7	Bangka	139	11	160	189	11	200
8	Belitung	68	1	69	68	1	69
9	Palembang	4	99	103	6	97	103
10	Pangkal Pinang	3	55	58	3	55	58
Total		2.525	246	2.771	2.704	244	2.948

Sumber: Kantor Statistik Sumsel

Peran empat sektor ekonomi pada PDRB Sumatra Selatan selama ini belumlah banyak berubah yaitu sektor industri pengolahan (20%), sektor pertanian (21%), sektor perdagangan (18%), serta sektor pertambangan dan galian 17%. Tidak hanya PDRB mengalami pertumbuhan negatif, PAD pun mengalami pertumbuhan negatif.

Dalam masa 3 tahun PDRB Sumatra Selatan, baik dengan atau tanpa migas telah mengalami pertumbuhan negatif, yaitu -2,17% dari tahun 1996-1998. Perumbuhan negatif ini sebagai dampak langsung krisis moneter yang berkepanjangan. Sektor yang mengalami pertumbuhan negatif terbesar adalah sektor keuangan, industri, perdagangan dan pengangkutan, yang masing-masing secara berurut turun sebesar -17%, -10%, -10% dan -9%.

Sektor pertambangan dan galian tak luput pula mengalami pertumbuhan negatif yaitu sebesar -3%.

Empat kabupaten yang memiliki pangsa terbesar terhadap PDRB Sumatra Selatan secara berurut adalah PDRB Palembang sebesar 22%, Muba sebesar 17%, Muara Enim 16%, dan Ogan Komering Ulu pangsa sebesar 9% terhadap PDRB Sumatra Selatan. Pangsa PDRB Pangkal Pinang dan Belitung masing-masing hanya sebesar 2% dan 3% terhadap PDRB Sumatra Selatan.

Beberapa simpul dapat diambil dari tabel tentang APBD Sumatra Selatan di bawah ini. Pertama, seluruh penerimaan Propinsi Sumatra Selatan dalam kurun waktu lima tahun terus meningkat, namun pada tahun 2000 menurun. Kedua, pendapatan asli daerah (PAD) semakin menurun dan dalam kurun waktu lima tahun menurun rata-rata sebesar 8,8 %. Ketiga sebab terjadinya penurunan PAD karena adanya penurunan yang berasal dari pajak daerah sebesar 4,4%. Keempat terjadi pula penurunan terhadap bagi hasil pajak dan bukan pajak sebesar 9,5%. Kelima, sebagai akibat terjadinya penurunan PAD dan Bagi hasil pajak dan bukan pajak, maka subsidi dan sumbangan menjadi meningkat, dan masing-masing meningkat sebesar 9,8% dan 21,5%.

Tabel 2. PDRB atas Harga Konstan 1993
Menurut Sektor di Sumatra Selatan

No	Kabupaten/Kota	1996 (Rp Juta)	1998 (Rp Juta)
1	Pertanian	2.579.819	2.742.215
2	Pertambangan & penggalian	2.186.251	2.209.568
3	Industri pengolahan	2.826.840	2.663.279
4	Listrik, gas, air bersih	98.209	115.821
5	Bangunan	1.075.750	749.499
6	Perdagangan, hotel & restoran	2.423.154	2.347.253
7	Pengangkutan & Komunikasi	688.867	655.443
8	Keuangan, sewa, jasa perush	705.006	614.077
9	Jasa-Jasa	937.267	956.534
	PDRB dengan migas	13.521.163	13.053.689
	PDRB tanpa migas	11.566.265	11.070.276

Sumber: Sumsel Dalam Angka 1998

Pemerintahan daerah yang desentralistik dituntut untuk lebih kreatif dan inovatif. Penurunan PAD yang terjadi karena menurunnya pajak daerah, merupakan refleksi bahwa kreatifitas dan inovatif daerah Sumatra Selatan belum optimal.

Pengalaman lebih dari tiga dekade telah mengajarkan kepada setiap anak bangsa, bahwa sistem pemerintahan yang sentralistik telah berdampak melambannya dinamika pembangunan hampir di segala bidang. Selama lebih dari 33 tahun pembangunan nasional identik dengan penumpukan dana dan manusia berkualitas di Jakarta. Kecemburuan semakin nyata, rasa ketidakadilan pun semakin terasa, namun kesadaran atas perlakuan pusat yang tak adil nyaris tak muncul di reformasi.

Daerah kaya akan SDA menjadi semakin tak berdaya, bahkan jumlah penduduk miskinpun semakin meningkat. Kemudian ingin memisahkan diri dari NKRI. Tuntutan tidak hanya datang dari yang kaya akan SDA andalan seperti migas, namun juga daerah yang kaya akan timah seperti Kabupaten Bangka dan Belitung.

Sajian data pada tabel berikut tentang porsi PAD, APBD, Subsidi dan Bantuan yang diterima kabupaten dan kota di Sumatra Selatan. Kolom PAD dan APBD adalah hasil perhitungan antara rasio jumlah murid dan penduduk dikali PAD dan APBD. Kolom Susidi dan Bantuan adalah hasil perhitungan antara rasio penduduk miskin dan jumlah penduduk masing-masing kabupaten/kota dengan masing-masing Subsidi dan Bantuan untuk kabupaten dan kota.

Tabel 3. APBD Propinsi Sumatra Selatan Tahun Anggaran 1996/1997 - 2000
(dalam Rp juta)

No	URAIAN	96/97	97/98	98/99	99/00	2000
1	Sisa anggaran tahun lalu	31.536	22.568	34.507	28.688	24.661
2	Pendapatan Asli Daerah	86.180	97.826	66.731	64.707	59.480
	a. Pajak Daerah	63.705	72.605	58.800	58.000	53.200
	b. Retribusi daerah	14.332	17.314	1.607	1.787	1.884
	c. Laba BUMD	1.346	1.444	1.537	1.555	1.883
	d. Penerimaan dinas	-	227	-	-	-
	e. Penerimaan lain-lain	6.797	6,237	4.787	3.364	2.513
3	Bagi hasil pajak/b. pajak	46.160	38.462	87.695	39.555	31.030
	a. Hasil pajak	23.125	21.932	23.115	24.400	18.350
	b. Bukan pajak	23.034	16.530	64.580	15.155	12.680
4	Sumbangan & bantuan	94.855	106.662	113.746	174.117	180.445
	a. Sumbangan	35.964	41.908	43.860	43.860	52.321
	b. Bantuan	58.888	64.754	69.886	130.257	128.124
	Penerimaan Pembangunan					
	a. Pinjaman Pemda	-	-	-	-	-
	b. Pinjaman BUMD	-	-	-	-	-
	Jumlah	258.728	265.518	302.679	329.929	295.615

Sumber: Biro Keuangan Pemda Propinsi Sumatra Selatan

Tabel 4
 Jumlah PAD, APBD, Subsidi dan Bantuan Per Kabupaten/Kota
 Menurut Rasio Pddk Miskin dan Murid Terhadap Penduduk
 Di Propinsi Sumatra Selatan. 1998/1999

Kabupaten/Kota	PAD x RMP	APBD x RMP	SUBSIDI x MP	BANTUAN x MP
Ogan Komering Ulu	1.110.757.500	24.437.805.517	2.151.355.070	1.275.452.060
Ogan Komering Ilir	838.619.100	15.622.053.576	1.416.147.552	589.723.055
Muara Enim	1.361.115.928	26.189.379.557	396.356.342	155.096,1
Lahat	948.345.210	337.718.889	402.995.106	5.078.698
Musi Rawas	790.579.508	17.710.061.445	7.595.333.878	3.821.425.537
Musi Banyuasin	818.752.732	17.466.748.579	1.550.293.836	749.553.948
B a n g k a	493.582.200	16.823.192.390	348.810.247	224.661.383
Belitung	848.043.985	7.877.945.239	41.020.244	27.264.741
Palembang	4.349.430.608	25.672.365.937	63.878.310	18.531.143
Pangkal Pinang	806.690.429	8.991.616.052	0	0

Sumber : Biro Keuangan Pemda Propinsi Sumatra Selatan (diolah)

Keterangan: Kolom (1) & (2) adalah hasil kali antara PAD & APBD dengan rasio murid-penduduk.

Sedangkan kolom (3) & (4) adalah hasil kali antara Subsidi & Bantuan dengan rasio warga miskin-penduduk

Kelcmahan tabel di atas adalah tidak menyajikan data sebelumnya, sehingga angka-angka dapat diperbandingkan untuk melihat perkembangan. Hasil perhitungan kolom (1) dan (2) menunjukkan bahwa besarnya PAD dengan bobot rasio murid dengan penduduk (RMP). Palembang PAD hasil bobot (RMP x PAD) murid menunjukkan angka terbesar. Padahal bobot RMP Kota Palembang hanya berada pada urutan ke empat. Bobot dan rasio murid-penduduk terbesar adalah Kotamadya Pangkal Pinang, namun kotamadya ini hanya memperoleh PAD hasil bobot terkecil untuk seluruh daerah bawah. Di Sumsel. Dengan demikian bobot murid-penduduk terbesar belum tentu PAD murid-penduduknya besar, karena realisasi PAD Pangkal Pinang memang terkecil, dan realisasi PAD absolut Palembang terbesar.

Kabupaten Lahat tampil agak berbeda RMP jatuh pada urutan ke-2, absolut realisasinya PAD berada pada urutan ke-7. Namun demikian PAD-RMP berada urutan ke-4. RMP Muba berada pada peringkat terbawah. Realisasi PAD termasuk empat besar, karena jumlah murid terbesar ke-3.

Jumlah penduduk miskin atau pra-sejahtera terbanyak dimiliki Kabupaten OKU, Muba, dan OKI. Bobot rasio miskin-penduduk (MP) justru sama yaitu: OKU, Muba dan OKI. Namun subsidi dikalikan dengan MP terbesar dimiliki Kabupaten Mura, dan kabupaten ini memiliki penduduk miskin terbesar ke-4 setelah OKU, Muba dan OKI. Belitung relatif konsisten. Jumlah penduduk miskin kedua daerah berada pada urutan 8 dan 9 (yang miskin sedikit).